

# Komparasi studi kasus pemerintah Jepang dan Indonesia dalam pendidikan pengurangan risiko bencana dalam konteks masa pandemi covid-19

WAHYU AGUNG KUNCORO<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

\*Korespondensi: [wahyuagungkuncoro67@gmail.com](mailto:wahyuagungkuncoro67@gmail.com)

Diterima: 05 November, 2014

Direvisi: 15 Desember, 2023

Disetujui: 20 Januari, 2024

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Sejak dinyatakan adanya pandemi COVID-19 oleh WHO, banyak negara menutup sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak dari keterpaparan virus yang dapat saja terjadi pada saat berada di lingkungan sekolah. Kekhawatiran semakin lama anak-anak tidak kembali ke sekolah dapat mengancam ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke empat yaitu pemenuhan hak mendapatkan Pendidikan Berkualitas di tahun 2030. Studi ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. **Metode:** Studi ini menggunakan metode peninjauan literatur yang berkaitan dengan kebijakan sektor pendidikan di kedua negara. **Temuan:** Hasil dari tinjauan literatur didapatkan bahwa baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia merespon dampak pandemic pada sektor pendidikan dengan cara yang sama yaitu melakukan penutupan sekolah-sekolah untuk melindungi keselamatan dan Kesehatan dari warga sekolah. Kedua pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian bantuan dalam mendukung metode belajar dari rumah. Perbedaan yang mendasar adalah anjuran penutupan sekolah tidak menggunakan legalitas dokumen, sementara pemerintah Indonesia menggunakan surat edaran Menteri. **Kesimpulan:** Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat respon yang dilakukan perlu didukung oleh kebijakan.

**KATA KUNCI:** pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, pendidikan risiko bencana.

## ABSTRACT

**Background:** Since the WHO declared the COVID-19 pandemic, many countries have closed schools to protect children from exposure to the virus that could occur while in the school environment. Concerns that the longer children do not return to school can threaten the achievement of the fourth Sustainable Development Goal, namely the fulfillment of the right to quality education by 2030. This study aims to analyze the policies implemented by the Japanese and Indonesian governments in responding to the impact of the COVID-19 pandemic on the education sector. **Methods:** This study uses the literature review method related to education sector policies in both countries. **Findings:** The results of the literature review found that both the Japanese and Indonesian governments responded to the impact of the pandemic on the education sector in the same way by closing schools to protect the safety and health of school residents. Both governments also issued policies related to providing assistance in supporting learning methods from home. The fundamental difference is that the recommendation to close schools does not use a legal document, while the Indonesian government uses a Ministerial circular letter. **Conclusion:** The policies implemented by the Japanese and Indonesian governments show that in emergency situations the response needs to be supported by policies.

**KEYWORDS:** disaster risk education, Indonesian government, Japanese government,...

## Cara Pengutipan:

Kuncoro, W. A. (2024). Komparasi studi kasus pemerintah Jepang dan Indonesia dalam pendidikan pengurangan risiko bencana dalam konteks masa pandemi covid-19. *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment* 1(1), 42-49. <https://doi.org/10.61511/gg.v1i1.2024.947>

**Copyright:** © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



## 1. Pendahuluan

Menurut Pandemi COVID-19 berdampak secara simultan terhadap kehidupan manusia termasuk pada sector pendidikan. Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) mendefinisikan bahaya/ancaman biological adalah sebagai berikut: Biological hazards are of organic origin or conveyed by biological vectors, including pathogenic microorganisms, toxins and bioactive substances. Examples are bacteria, viruses or parasites, as well as venomous wildlife and insects, poisonous plants and mosquitoes carrying disease-causing agents (Shaw et al., 2021). Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai global pandemi tanggal 11 Maret 2020. Satu hari sejak itu menurut catatan UNESCO sebanyak 79 negara memutuskan untuk menutup sekolah (Reimers, 2022) dan kemudian tercatat sebanyak 184 negara menutup sekolah (ECW, n.d.). Pada saat puncak penyebaran COVID-19 di akhir April 2020, sekolah yang ditutup karena COVID-19 memulangkan hampir 1,6 miliar murid jumlah tersebut setara dengan 94 persen dari murid yang terdaftar di seluruh dunia dan hingga 99 persen dari populasi siswa di negara berpenghasilan kelas menengah ke bawah (Lennox et al., 2021).

Dalam masa darurat Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi semua orang (INEE, 2010). Krisis global ini mencegah anak-anak dan remaja di setiap negara, termasuk mereka yang terkena dampak konflik dan pengungsian, dari pemenuhan hak mereka atas pendidikan yang berkualitas, aman dan inklusif. Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDG4), komunitas global berkomitmen untuk mewujudkan hak atas pendidikan berkualitas bagi semua anak dan remaja pada tahun 2030. Krisis COVID-19 membuat janji ini lebih terancam daripada sebelumnya (INEE, 2020).

Saat ini dapat dikatakan risiko terinfeksi COVID-19 adalah sebuah risiko baru, dimana orang-orang memaknainya sebagai “ketakutan” dan “ketidaktahuan”. Slovic (1987), berpendapat bahwa semakin tinggi factor tingkat ketakutan dan semakin tinggi ketidaktahuan risiko, semakin membuat orang ingin melihat bagaimana risiko tersebut dikurangi, dan semakin mereka ingin melihat peraturan yang diberlakukan untuk mengurangi risiko yang diinginkan (Shaw et al., 2021). Fenomena global pandemi COVID-19 kemudian direspon oleh berbagai pemerintah dalam rangka mengurangi dampak terutama pada sektor pendidikan. Studi ini mencoba membandingkan kebijakan respon bencana COVID-19 pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian mengenai pendidikan risiko bencana antar dua pemerintahan menggunakan model pendekatan kualitatif kepustakaan. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan mampu melihat perkembangan pendidikan dalam dua negara berbeda. Data penelitian dalam penelitian ini berasal dari berbagai bahan literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan berita. Melalui data yang dikumpulkan penulis selanjutnya menganalisis menggunakan metode *literatur review* untuk menafsirkan pemahaman bacaan mengenai pendidikan risiko bencana di pemerintahan Jepang dan Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Literature review

Studi Pendidikan bencana merupakan salah satu komponen pendidikan keselamatan di Jepang yang memiliki tujuan mempromosikan kemampuan seseorang untuk mengatasi normalisasi bias yang menghalangi penilaian, perkiraan, dan menghindari risiko ancaman

bencana yang realistis, sehingga memungkinkan mengambil tindakan pro aktif, pragmatis terhadap ancaman yang membayangi tersebut (Shaw et al., 2021). Pandemi COVID-19 menyadarkan semua negara akan pentingnya mengintegrasikan perencanaan untuk keadaan darurat, termasuk di luar bencana alam, ke dalam rencana dan anggaran sektor (Lennox et al., 2021). Pendidikan kebencanaan yang meliputi pendidikan tentang risiko bencana, mitigasi dan strategi kesiapsiagaan, merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi akibat negatif dari bencana (Johnson et al., 2014). Namun banyak yang beranggapan bahwa mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah sudah cukup memadai untuk diakui sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bagi sekolah, banyak kasus yang ditemukan mengakui bahwa pendidikan kebencanaan tidak hanya mengintegrasikan informasi bencana ke dalam kurikulum sekolah (Rafliana, 2012). Pendidikan kebencanaan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja. Kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas pendidikan terus menerus pada komunitas juga dapat membantu membangun relasi percaya diantara mereka (murid dan komunitas), memahami alam dan komunitas secara menyeluruh. Ketika suatu masyarakat terlibat di dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana dan mereka merasa memiliki rencana keselamatan mereka sendiri, mereka akan lebih siap dan dapat lebih baik dalam mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi mereka (Shaw et al., 2021).

Pada tanggal 27 Februari 2020, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meminta semua sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di seluruh negeri (dari usia 6 hingga 18 tahun) untuk tutup hingga akhir liburan musim semi, hingga awal April untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak. Meskipun pernyataan tersebut bukan merupakan sebuah perintah namun berdampak pada tingkat penutupan 98,8% di antara sekolah dasar kota dan penutupan sekolah menengah di 46 dari 47 prefektur di Jepang (Iwata et al., 2020).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan virus COVID-19 telah masuk di Indonesia tanggal 02 Maret 2020 (Rulandari, 2020). Sejak itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merespons cepat dengan menutup sekolah dan menyarankan anak-anak untuk belajar dari rumah. Dampak dari kebijakan tersebut telah menyebabkan penutupan lebih dari 500.000 sekolah dan berdampak pada lebih dari 68 juta siswa dan hampir 4 juta guru dan tenaga kependidikan lainnya (Amri et al., 2021).

Selama tahun 2020, negara-negara menjadi lebih fleksibel dalam pendekatan mereka terhadap modalitas dan jalur pembelajaran (Lennox et al., 2021). Selama masa darurat di Jepang, sekolah harus merubah metode pembelajaran yang pada awal pandemi masih dapat melakukan kontak dengan cara guru kunjung menjadi komunikasi tidak langsung seperti menggunakan surat atau email, untuk mencegah penyebaran virus. Koordinator kurikulum masing-masing sekolah untuk menata ulang kurikulum sekolah baru yang dapat menggantikan waktu belajar yang hilang karena penutupan sekolah dan menyesuaikan dengan aturan pendidikan sekolah baru masa pasca infeksi corona (Shaw et al., 2021). Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Jepang (MEXT) pada bulan April 2020 menyebutkan pelaksanaan *home based learning* dilakukan dengan berbagai metode antara lain menggunakan buku dan bahan ajar, menggunakan program TV, menggunakan video ajar yang dibuat oleh dewan pendidikan, materi pembelajaran digital lainnya, pembelajaran interaktif secara online, dan latihan belajar di rumah (Iwabuchi et al., 2022).

Di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengambil kebijakan memberikan keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan untuk menyiasati berbagai hambatan dan tantangan proses belajar mengajar online, namun tetap menghindari siswa keluar rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Rulandari, 2020). Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020, pemerintah Indonesia meniadakan ujian nasional tahun 2020 dan menerapkan metode belajar dari rumah. Selama menggunakan metode belajar dari rumah guru tidak dibebani untuk menuntaskan capaian kurikulum (*Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia, n.d.*).

Setelah masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 14 Mei 2020, Dewan Pendidikan Kota Omuta di Jepang mulai merencanakan untuk membuka kembali sekolah dan mengurangi jumlah libur menjadi hanya 11 hari dengan tujuan mengejar keterlambatan

pembelajaran akibat dari pandemi COVID-19. Keputusan ini diambil dengan melakukan konsultasi dengan guru, orang tua dan murid. Tanggal 1 Juni 2020, semua sekolah di Kota Omuta telah dibuka secara bersamaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 seperti menggunakan masker, pengukuran suhu, melakukan disinfeksi, mencuci tangan, menjaga jarak, memperbaiki ventilasi udara dan lain sebagainya (Shaw et al., 2021).

Di Indonesia pembukaan kembali sekolah berlandaskan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya SKB ini lebih banyak dikenal dengan penyebutan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Dalam kebijakan ini mengatur upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam memitigasi penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Misalnya, pembatasan jumlah murid yang datang, pengukuran suhu, memiliki sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mengatur ruang kelas dengan penerapan jaga jarak, membentuk satuan tugas COVID-19 di sekolah, mendapatkan persetujuan dari orang tua murid dan komite sekolah dan lain sebagainya. SKB 4 Menteri pertama kali dikeluarkan pada tahun 2020 mendapat kritikan dari berbagai kalangan antara Ikatan Dokter Anak Indonesia, asosiasi guru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan lainnya yang menilai bahwa sekolah memiliki keterbatasan dalam menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Amri et al., 2021).

### 3.2 Pembahasan

Dari literatur review yang penulis lakukan, kebijakan pemerintah Jepang dan Indonesia dalam hal mengurangi risiko keterpaparan atau penyebaran virus COVID-19 di sekolah terdapat kesamaan, yaitu kedua pemerintah negara menutup sekolah untuk sementara waktu dan memberlakukan metode belajar dari rumah. Perbedaannya ada pada jenis kebijakan yang dilakukan di kedua negara. Di Jepang, penutupan sekolah tidak didasari pada sebuah kebijakan tertulis namun berdasarkan himbauan atau permintaan dari Perdana Menteri Jepang saat itu yaitu Shinzo Abe. Sementara di Indonesia kebijakan penutupan sekolah dilakukan dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Di Jepang Dewan Pendidikan (Board of Education) Kota Omuta, melakukan respon penyebaran COVID-19 dengan berkolaborasi bersama sekolah, orang tua dan masyarakat setempat sejak pandemi COVID-19 terjadi di Jepang. Pada masa awal pandemi Dewan Pendidikan mengadakan pertemuan dengan para kepala sekolah untuk mendiskusikan rencana kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi yang berdampak pada sektor pendidikan. Dewan Pendidikan menjalin kolaborasi dengan dinas sosial untuk memastikan murid yang berasal dari keluarga miskin tetap bisa mendapatkan makan siang selama penutupan sekolah. Selain itu Dewan Pendidikan juga memerintahkan pekerja sosial untuk melakukan pemantauan dengan melakukan kunjungan terhadap murid yang memiliki pengalaman kekerasan di rumah.

Hal tersebut menarik menurut penulis terkait dengan proteksi sosial untuk murid yang dilakukan Pemerintah Kota Omuta Jepang selama penutupan sekolah atau pada masa belajar dari rumah adalah pendistribusian makan siang bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan adanya pemantauan terhadap murid-murid yang memiliki pengalaman mengalami kekerasan di lingkungan rumah. Hal tersebut sangat berkaitan dengan standar-standar minimum pendidikan dalam situasi darurat, dimana dalam pelaksanaan pendidikan dalam situasi darurat upaya penjaminan hak anak untuk dapat terus berkembang salahsatunya adalah dengan memastikan ketersediaan pangan yang bergizi. Selain itu upaya perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyediaan akses terhadap layanan pendidikan dalam situasi darurat.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemdikbud memberikan kelonggaran dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan

(BOP) yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pengaturan kelonggaran penggunaan dana tersebut diatur secara terpisah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain melalui pelonggaran BOS dan BOP, Kemdikbud juga mendistribusikan bantuan paket kuota internet untuk mendukung belajar dari rumah yang menggunakan berbagai macam aplikasi daring.

Diketahui bahwa Dewan Pendidikan Kota Omuta sejak tahun 2011 telah membangun jejaring kerja dengan membentuk konsorsium Education for Sustainable Development (ESD) yang beranggotakan beragam institusi seperti akademisi, perusahaan-perusahaan lokal, NGO/Non-Profit Organisation, dan lainnya. Dengan dibentuknya konsorsium ini keterkaitan sekolah dan komunitas di Kota Omuta diperkuat. Kota Omuta telah belajar pengelolaan bencana dan proses pemulihan dari pengalaman gempa dan tsunami tahun 2011 yang terjadi di Kota Kesenna. Kota Omuta memanfaatkan sebaik-baiknya pengalaman ESD yang sesuai dan menjalin hubungan dengan komunitas dan institusi lainnya untuk membuat rencana respon COVID-19 dan melakukannya dengan efektif (Shaw et al., 2021).

Untuk konteks di Indonesia, beberapa organisasi non-profit yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan kebencanaan tergabung dalam Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB). Selain itu Indonesia memiliki Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) yang dipimpin oleh Kemdikbud. Berdasarkan pengalaman penulis pada saat awal pandemi terjadi Kemdikbud melalui Seknas SPAB melakukan serangkaian pertemuan guna membahas rencana respon pandemi COVID-19 pada sektor pendidikan yang melibatkan anggota KPB.

Pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan ilmu yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan sekolah merupakan hal yang penting baik dalam situasi pandemic maupun pendidikan pengurangan risiko bencana lainnya. Hubungan antara sekolah-komunitas-keluarga, komunikasi risiko, dan kebiasaan bertanggung jawab dari warga adalah variabel kunci untuk mengurangi dampak dari bencana pandemic dan dapat diadaptasi ke dalam kebutuhan manajemen risiko bencana lainnya (Shaw et al., 2021).

#### **4. Kesimpulan**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah sebagai *duty bearer*. Anak-anak sebagai *right holder* dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan meskipun dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Standar Minimum Pendidikan dalam situasi darurat yang dikeluarkan *Inter-agency Network for Education in Emergencies* (INEE) telah menjadi kerangka kerja global yang digunakan di berbagai konteks bencana maupun krisis kemanusiaan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat respon yang dilakukan perlu didukung oleh kebijakan.

#### **Kontribusi Penulis**

Penulis berkontribusi penuh dalam penelitian.

#### **Pendanaan**

Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.

#### **Pernyataan Dewan Peninjau Etis**

Tidak berlaku.

**Pernyataan *Informed Consent***

Tidak berlaku.

**Pernyataan Ketersediaan Data**

Tidak berlaku.

**Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

**Akses Terbuka**

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

**Daftar Pustaka**

- Amri, A., Tebe, Y., Siantoro, A., Indrawati, M., & Prihadi, C. (2021). Teachers voices on school reopening in Indonesia during COVID-19 pandemic. *Social Sciences & Humanities Open*, 4(1), 100218. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100218>
- ECW. (n.d.). COVID-19 AND EDUCATION IN EMERGENCIES - educationcannotwait. Retrieved April 2, 2022, from <https://www.educationcannotwait.org/covid-19/>
- INEE. (2020). Technical Note: Education During COVID-19 Pandemic (Vol. 1). Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE).
- Iwabuchi, K., Hodama, K., Onishi, Y., Miyazaki, S., Nakae, S., & Suzuki, K. H. (2022). Primary and Secondary Education During Covid-19: Disruptions to Educational Opportunity During a Pandemic. In *Primary and Secondary Education During Covid-19*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4>
- Iwata, K., Doi, A., & Miyakoshi, C. (2020). Was school closure effective in mitigating coronavirus disease 2019 (COVID-19)? Time series analysis using Bayesian inference. *International Journal of Infectious Diseases*, 99, 57–61. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.07.052>
- Johnson, V. A., Ronan, K. R., Johnston, D. M., & Peace, R. (2014). Evaluations of disaster education programs for children: A methodological review. In *International Journal of Disaster Risk Reduction* (Vol. 9, pp. 107–123). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2014.04.001>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved April 2, 2022, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Lennox, J., Reuge, N., & Benavides, F. (2021). UNICEF's lessons learned from the education response to the COVID-19 crisis and reflections on the implications for education

- policy. *International Journal of Educational Development*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102429>
- Rafliana, I. (2012). Disaster education in Indonesia: Learning how it works from six years of experience after Indian ocean tsunami in 2004. *Journal of Disaster Research*, 7(1), 83–91. <https://doi.org/10.20965/jdr.2012.p0083>
- Reimers, F. M. (2022). Primary and Secondary Education During Covid-19. In F. M. Reimers (Ed.), *Primary and Secondary Education During Covid-19*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4>
- Rulandari, N. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on the World of Education in Indonesia. *IJSS Ilomata International Journal of Social Science*, 1(4), 242–250. <https://www.ilomata.org/index.php/ijss>
- Shaw, R., Sakurai, A., & Oikawa, Y. (2021). New Realization of Disaster Risk Reduction Education in the Context of a Global Pandemic: Lessons from Japan. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(4), 568–580. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00337-7>
- INEE. (2010). *STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN*. Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE). [www.ineesite.org](http://www.ineesite.org).

**Biographies of Author**

**Wahyu Agung Kuncoro**, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

- Email: [wahyuagungkuncoro67@gmail.com](mailto:wahyuagungkuncoro67@gmail.com)
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -